JADI BENCANA SOSIAL

1 Situs Judol Ditutup, Tumbuh 1.000

JAKARTA (KR) - Satu situs judi online (judol) ditutup, tumbuh 1.000 situs judol baru. Judi online sudah menjamur. Karena itu pemberantasan judol menjadi agenda yang tak mudah, sebab berkaitan dengan jaringan internasional. Menutup situs juga bukan menjadi solusi utama, karena pelaku judol sudah kadung kecanduan.

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar tentang bencana sosial judi online di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (28/11).

Meutya Hafid pun bersepakat dengan Menko PM terkait urgensi pemberantasan judi online. Kerja sama dan koordinasi antarlembaga dan kementerian menjadi kunci dalam keberhasilan penekanan judi online.

"Pada intinya kami yakin kalau kompak kuat sebagaimana arahan Presiden. Meskipun lintas tapi tetap karena semua terlink menjadi satu permasalahan judi online. Selama kompak, semuanya Insya Allah semua bisa ditangani," ujar Meutya Hafid.

Menurutnya, yang ditutup satu, tapi kemudian tumbuh sepuluh atau tumbuh seratus, itu memang memerlukan tenaga luar biasa. Butuh kesabaran tingkat tinggi karena perlu mendekati platform-platform global untuk mau menaati regulasi di Indonesia. "Kita perlu bolak-balik diskusi dengan mereka," ujarnya.

Menkomdigi berharap, koordinasi dengan Kemenko PM bisa memudahkan Pemerintah untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat. Rendahnya literasi mempermudah menjamurnya judol. "Judi online ini sesungguhnya penipuan secara online," tuturnya.

Muhaimin Iskandar mengakui, judi online sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, dan telah menjadi bencana sosial karena merusak siklus kesejahteraan masyarakat. "Saya telah berkoordinasi dengan Menkomdigi, Mbak Meutya, agar praktik judi online bisa ditekan," ujar Menko PM.

Disampaikan, kecenderungan dari judi online adalah penipuan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat hanya terlena akan keuntungan, padahal mereka pasti akan mengalami kerugian. Hal itu juga yang menjadikan judi online berpotensi menambah kemiskinan baru.

"Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat. Karena 8,8 juta warga yang terlibat judi online adalah kontributor kemiskinan baru yang setelah menjadi korban akan menjadi penambahan kaum miskin baru," ungkapnya. **(Ati)-f**

UNTUK MASA DEPAN DEMOKRASI

Konflik dan Resolusi Konflik Perlu Perhatian

YOGYA (KR) - Konflik dan resolusi konflik yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia perlu mendapat perhatian. Hal ini penting untuk pembelajaran bagi pembangunan perdamaian dan pengembangan demokrasi di masa depan.

Demikian disampaikan Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12) saat menyampaikan pidato kunci Seminar Nasional 'Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam Konteks Masa Depan Demokrasi Indonesia' di Balai Senat UGM, Kamis (28/11).

Jusuf Kalla atau JK menceritakan pengalamannya dalam melakukan resolusi konflik. Menurutnya, terdapat banyak konflik di Indonesia yang awalnya disangka sebagai konflik SARA, namun ternyata sebenarnya adalah konflik yang disebabkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Salah satu contohnya konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa lalu.

"Konflik GAM sebenarnya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat, karena Aceh kaya sumber dayanya, tetapi hanya mendapatkan sedikit," ujarnya.

Seminar juga menghadirkan dua narasumber yang sering berkontribusi dalam penyelesaian konflik, yaitu sosiolog dari UGM Lambang Trijono PhD dan Direktur Institut Dialog Antar-Iman (DIAN) Interfidei Yogyakarta Dr A Elga J Sarapung.

JK menambahkan, dalam resolusi konflik vertikal seperti di Aceh, Pemerintah harus memandang pihak yang berkonflik sebagai pihak yang setara, bukan sebagai musuh negara. "Perundingan harus menghormati satu sama lain, itu harus" ujar JK.

Prof Hamid Awaluddin SH LLM MA PhD, sebagai salah satu perancang resolusi konflik di Aceh bersama JK, sependapat bahwa awal konflik di Aceh bukan karena faktor agama, tetapi ketidakadilan yang mereka alami. "Pelaksanaan Syariat Islam sebenarnya tidak diminta oleh masyarakat Aceh, namun ditawarkan oleh Pemerintah," katanya.

Sementara itu Rektor UGM Prof Ova Emilia menyampaikan pentingnya pengalaman resolusi konflik dan keterkaitan antara pilihan strategi resolusi konflik sebagai upaya membangun perdamaian dan pengembangan demokrasi. **(Dev)-f**

QRIS Sambungan hal 1

transaksi yang dilakukan turis Singapura mencetak pertumbuhan 28 persen secara bulanan, didominasi oleh transaksi di Jakarta dan Riau. Sementara transaksi oleh turis Malaysia meningkat 8 persen secara bulanan dengan volume transaksi tertinggi di Jakarta dan Jawa Barat (indonesia.go.id). Bank BPD DIY pun sangat mendukung upaya Bank Indonesia untuk QRIS cross-border tersebut. Digitalisasi mutlak diperlukan untuk mempertahankan performa bisnis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah sehingga pelaku UMKM khususnya di Yogyakarta dapat menjadi makin kompetitif di era globalisasi saat ini.

Data QRIS per daerah juga menunjukkan hasil positif. Menurut Nurhalizal et.al (2023), QRIS memberikan dampak positif terhadap transaksi bisnis digital UMKM di Indonesia termasuk Pekanbaru. UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian telah mengalami peningkatan pendapatan sehari-hari melalui aplikasi QRIS yang memfasilitasi transaksi non-tunai dan meningkatkan efisiensinya. Penggunaan QRIS memberikan manfaat seperti kemudahan, efisiensi, transparansi administrasi dalam pembayaran elektronik, serta membantu masyarakat menuju cashless society. Menurut Hairani et.al. (2024), penggunaan QRIS berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM Kota Medan.

Menurut Alifia et.al. (2024), pertumbuhan jumlah pengguna QRIS serta volume dan nominal transaksi per merchant berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Tren ini tidak hanya terjadi di wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa, melainkan terjadi secara nasional di seluruh Indonesia. Peningkatan pendapatan dari QRIS tidak lepas dari kemudahan yang ditawarkan kepada UMKM yang tidak perlu lagi melakukan investasi besar dalam pembuatan QR code untuk berbagai platform pembayaran. Dengan QRIS, merchant dapat menerima pembayaran dari berbagai bank dan penyedia pembayaran digital. Selain itu, peningkatan pendapatan juga disebabkan oleh kemampuan QRIS dalam melayani pelanggan dari semua kelompok umur, apalagi generasi muda cenderung lebih menyukai metode pembayaran digital dibandingkan transaksi tunai.

Pandangan pelaku bisnis di atas yang menjelaskan bahwa QRIS sangat berpengaruh dalam peningkatan volume transaksi dan pendapatan dapat dijelaskan dengan salah satu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Solow-Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut Solow-Swan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Peran kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, yaitu ditunjukkan dengan nilai produksi rata-rata yang semakin meningkat. Apabila ditambahkan besaran biaya produksi yang diukur dengan biaya variabel rata-rata, maka peningkatan nilai produksi rata-rata yang semakin tinggi, akan berdampak terhadap penurunan biaya variabel rata-rata. Hal ini menunjukkan efisiensi nya kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, pemanfaatan QRIS yang dipandang sebagai unsur teknologi dalam kegiatan ekonomi secara teori dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Memang demikian adanya dalam pengembangan teori yang sejalan dengan praktik. Artinya, pendekatan deduktif (teoritis) dan pendekatan induktif (empiris) akan beriringan dalam penemuan teori-teori baru yang bermanfaat secara aksiologi bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, Bank Indonesia dan Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo yang fokus dengan pemanfaatan teknologi tetap harus mempertimbangkan berbagai kendala pemanfaatan QRIS sebagai bagian dari Sistem Pembayaran Indonesia.❑ **- d**

(Penulis, Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI, dan Peneliti Senior PT. Sinergi Visi Utama)

TAK HADIRI PEMERIKSAAN DI BARESKRIM

Firli Bahuri Kembali Mangkir

JAKARTA (KR) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri batal menghadiri pemeriksaan yang rencananya dilakukan di Bareskrim Polri, Kamis (28/11). Selanjutnya tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan.

"Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak di Jakarta.

Saat dikonfirmasi alasan Firli Bahuri batal menghadiri pemeriksaan pada hari ini, Ade Safri tidak menjelaskan secara detail. "Bisa tanya langsung ke Ian Iskandar, penasihat hukumnya," kilahnya.

Ditanya soal alasan Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim Polri, Ade Safri menjelaskan, karena penanganan kasus ini ditangani oleh tim penyidik gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Polda Metro Jaya dan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

"Jadi tempat pemeriksaan bisa dilakukan di situ (Bareskrim) atau tempat lain yang telah ditentukan, itu bisa," katanya, seraya menambahkan, pemeriksaan Firli tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Sementara Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar yang tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 13.00 WIB tidak berkomentar banyak dan hanya menjelaskan nanti disampaikan ke awak media. **(Ant/Has)-f**

BPOM Temukan 55 Kosmetik Berbahaya

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 55 produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya selama periode pengujian dari November 2023 hingga Oktober 2024.

Adapun 55 produk kosmetik tersebut terdiri atas 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, enam produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik, dan 14 produk kosmetik impor.

"Terhadap produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya, BPOM telah mencabut izin edar serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis (28/11).

Taruna Ikrar mengatakan, BPOM melalui 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia juga telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi, distribusi, dan media daring. **(Ant/San)**